LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 390 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

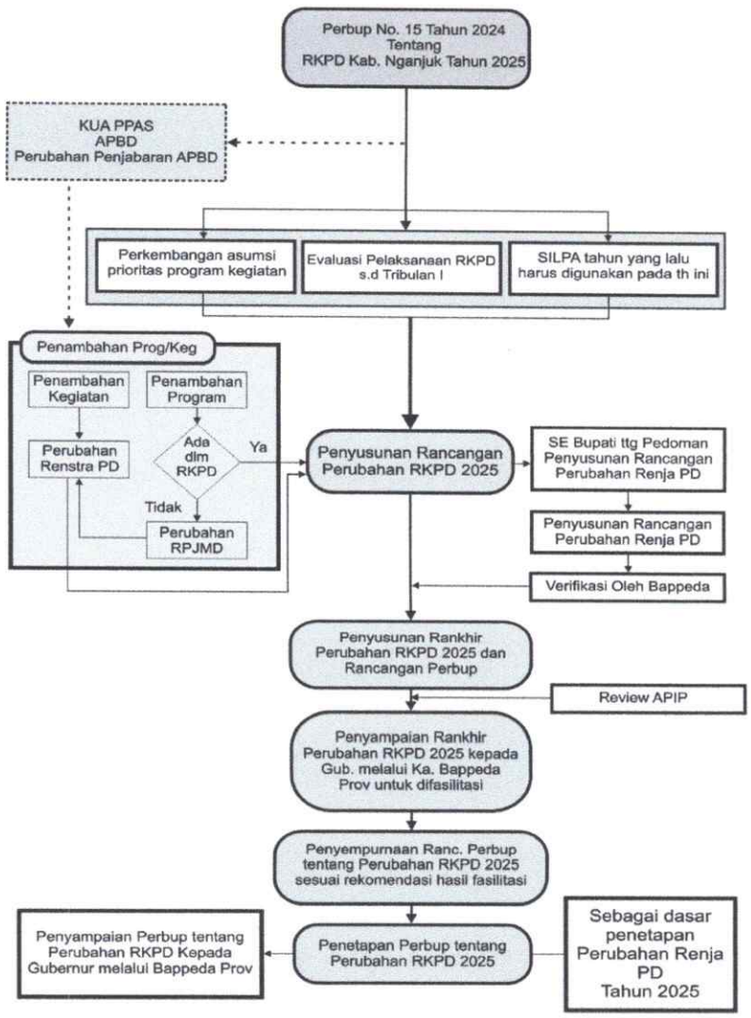
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menjabarkan rencana Program/kegiatan dan Subkegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika**

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

2. **Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

   a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
   c) pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   e) pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
   f) pengelolaan dan pengembangan e-government dan smartcity;

g) pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;

h) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;

i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1) Sekretariat, terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan dan Fungsional.
2) Bidang Statistik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
   a) Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik;
   b) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3) Bidang Aplikasi Informatika dan persandian, terdiri dari :
   a) Seksi Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan informasi;
   b) Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 perubahan kedua atas keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2024;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (ke-satu) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk; dan
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui capain kinerja program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program/kegiatan/subkegiatan Renstra ; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan I Tahun 2025

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang dievaluasi (2025) s/d TB I	Capaian Kinerja RKPD Th 2025 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6x 100%)	10= (5+8)	11= (10/4x100%)	12
	Urusan : Wajib Bukan Pelayanan dasar										
	Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika										
Terselenggaranya SPBE Daerah yang Optimal	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**83**	**86,5**	**82**	**86,56**	**86,56**	**105.56**	**86,56**	**104,29**	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	**91**	**80,10**	**86**	**-**	**-**	**-**	**80,10**	**88,20**	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang di susun**	**90 Dokumen**	**61 Dokumen**	**69 Dokumen**	**27 Dokumen**	**27 Dokumen**	**39,13**	**88 Dokumen**	**97,78**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50	8 Dokumen	88,89	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	90 Dokumen	35 Dokumen	30 Dokumen	-	-	-	35 Dokumen	38,89	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	90 Dokumen	13 Dokumen	30 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	73,33	35 Dokumen	38,89	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50	10 Laporan	55,56	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi perangkat Daerah yang di susun**	**189 Dokumen**	**76 Dokumen**	**63 Dokumen**	**56 Dokumen**	**56 Dokumen**	**89**	**132 Dokumen**	**69,84**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	36 ASN	22 ASN	36 ASN	36 ASN	163,64	36 ASN	150	Sekretariat
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135 Dokumen	62 Dok	45 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	37,78	79 Dokumen	58,52	Sekretariat

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang dievaluasi (2025) s/d TB I	Capaian Kinerja RKPD Th 2025 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6x 100%)	10= (5+8)	11= (10/4x100%)	12
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	200	3 Laporan	100	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan	1 3 Laporan	13 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15,38	15 Laporan	38,46	Sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat Daerah yang di susun**	**65 Dokumen**	**25 dokumen**	**25 dokumen**	**-**	**-**	**-**	**25 Dokumen**	**38,46**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	84 Orang	20 Orang	-	-	-	84 Orang	420	Sekretariat
	Sosialisasi Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	1500 Orang	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah fasilitasi bagian umum yang dilaksanakan**	**36 Laporan**	**12 laporan**	**12 laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**25**	**15 Laporan**	**41,67**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	-	1 Paket	100	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	200	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 Paket	100	Sekretariat
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	1 Paket	1 Paket	25	5 Paket	125	Sekretariat
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	200	3 Paket	150	Sekretariat

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang dievaluasi (2025) s/d TB I	Capaian Kinerja RKPD Th 2025 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
						I					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6x 100%)	10= (5+8)	11= (10/4x100%)	12
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2736 Dokumen	910 dokumen	912 dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	5,48	960 Dokumen	35,08	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	30 Laporan	30 laporan	5 Laporan	5 Laporan	16,67	35 Laporan	58,34	Sekretariat
	Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	900 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	16,67	350 Dokumen	38,89	Sekretariat
	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang di adakan**	**121 Buah**	**48 Unit**	**26 Buah**	**-**	**-**	**-**	**48 Unit**	**39,67**	
	Pengadaan Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
	Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	48 Unit	15 Unit	-	-	-	48 Unit	320	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jasa**	**4 Jasa**	**4Jasa**	**4 Jasa**	**4 Jasa**	100	**8 Jasa**	**200**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 Laporan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	25	5 Laporan	125	Sekretariat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	3 Laporan	3 Laporan	25	15 Laporan	125	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	12 Laporan	12 laporan	3 Laporan	3 Laporan	25	15 Laporan	750	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**62 Unit**	**42 Unit**	**42 unit**	**23 unit**	**23 unit**	**54,76**	**65 Unit**	**104,84**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 Unit	10 Unit	100	20 Unit	200	Sekretariat
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	100	Sekretariat
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 unit	25 Unit	25 unit	12 unit	12 unit	48	37 Unit	148	Sekretariat

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang dievaluasi (2025) s/d TB I	Capaian Kinerja RKPD Th 2025 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6x 100%)	10= (5+8)	11= (10/4x100%)	12
	Pemeliharaan/rehabilitasi/ gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 Unit	2 unit	1 unit	1 unit	50	3 Unit	150	Sekretariat
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	**Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**	**-**	**87,09%**	**80**	**-**	**-**	**-**	**87,09%**	**-**	
		Presentase media diseminasi informasi publik yang tersedia	**90**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**111,11**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/kota	**Jumlah perangkat daerah berpredikat "informatif"**	**10**	**13 PD**	**5 PD**	**42 PD**	**42 PD**	840	**42 PD**	**420**	
		Jumlah KIM berpredikat "Aktif"	**15 KIM**	**7 KIM**	**10 KIM**	-	-	-	-	-	
		Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif	**52 OPD**	**46 PD**	**25 PD**	-	-	-	-	-	
		Persentase pengadaan masyarakat yang terespon tepat waktu	**100%**	**99,60%**	**100%**	**94,80%**	**94,80%**	94,80	**194,44%**	**194,44**	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	33,33	Bidang Statistik PIKP
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	33,33	Bidang Statistik PIKP
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	33,33	Bidang Statistik PIKP
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	-	10 Komunitas	5 Komunitas	5 Komunitas	5	5 Komunitas	-	Bidang Statistik PIKP
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	-	30 Permohonan	7 Permohonan	7 Permohonan	23,33	7 Permohonan	-	Bidang Statistik PIKP
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	-	-	7 Media	4 Media	4 Media	57,14	4 Media	-	Bidang Statistik PIKP

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang dievaluasi (2025) s/d TB I	Capaian Kinerja RKPD Th 2025 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6x 100%)	10= (5+8)	11= (10/4x100%)	12
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase layanan publik yang diselengarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nilai Aspek TIK	**3,50**	**3,38**	**2,50**	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/kota	**Nilai Tingkat Kematangan layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah**	**4**	**5**	**3**	-	-	-	**5**	**95,83**	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	36 Dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	33,33	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-	-	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	33,33	4 Dokumen	-	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	1 Unit	100	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/kota	**Tingkat Kematangan pembangunan aplikasi SPBE**	**3**	**5**	**3**	-	-	-	**5**	**166,67**	
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	**3**	**5**	**3**	-	-	-	**5**	**166,67**	
		Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	**3**	**5**	**3**	-	-	-	**5**	**166,67**	

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang dievaluasi (2025) s/d TB I	Capaian Kinerja RKPD Th 2025 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6x 100%)	10= (5+8)	11= (10/4x100%)	12
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-	1 Unit	100	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik.	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	-	4 Unit	33,33	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas.	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 Dokumen	33,33	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 Dokumen	33,33	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	-	-	2 Aplikasi	-	-	-	-	-	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	52 PD	52 PD	52 PD	100	52 PD	-	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
	Bidang Urusan : Statistik										
	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	**Presentase data sektoral yang tersedia dan update**	**-**	**90%**	**N/A**	**-**	**-**	**-**	**90%**	**-**	
		Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data terbuka	**3**	**4**	**3**	**-**	**-**	**-**	**4**	**133,33**	
	Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan**	**3 buku**	**1 Buku**	**1 Buku**	**-**	**-**	**-**	**1 Buku**	**33,33**	

Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra)	Realisasi Kinerja Renstra s.d RKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang dievaluasi (2025) s/d TB I	Capaian Kinerja RKPD Th 2025 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Pelaksanaan RKPD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/6x 100%)	10= (5+8)	11= (10/4x100%)	12
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan Diseminasi data statistik sektoral.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	33,33	Bidang Statistik PIKP
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesial	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	1 dokumen	-	-	-		-	Bidang Statistik PIKP
	Bidang Urusan : Persandian			-				-			
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	**Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**89%**	**96,40%**	**87%**	**-**	**-**	**-**	**96,40%**	**108,31**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	**Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE**	**3**	**2**	**2**	**-**	**-**	-	**2**	**66,67**	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah an daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25	15 Laporan	41,67	Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1	≥ 91 %	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tribulan I Tahun 2025 hasil yang dicapai sebesar 9% dengan kreteria Sangat Rendah. Dari Program/kegiatan dan subkegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Analisi Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran sampai dengan tribulan I tahun 2025

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	105,56%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika secara baik	Target Renstra PD telah tercapai, namun tetap melakukan evaluasi secara berkala dan komprehensif untuk memastikan efektivitas program penunjang dan menyesuaikan target Renstra PD jika diperlukan	Menguatkan tata kelola dan manajemen dalam penerapan SAKIP dan SKM, meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, penerapan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan
Program Informasi dan Komunikasi Publik	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk belum dilakukan penilaian dan evaluasi	Terget Renstra PD belum tercapai	Meningkatkan kegiatan tata kelola informasi dan komunikasi publik, optimlasisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan kualitas konten dan diseminasi informasi, peningkatan partisipasi dan

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
		keterlibatan masyarakat, pengauatan kapasitas SDM, evaluasi dan monitoring
Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kemenpan RB	Terget Renstra PD belum tercapai	- Tetap melakukan Tata kelola dan standarisasi dalam penyusunan arsitektur SPBE, penerapan standar keamanan informasi, kebijakan data terbuka, pengelolaan layanan IT - Pengembangan dan Implementasi Aplikasi - Meningkatkan Infrastruktur teknologi informasi dan SDM
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum dilaksanakan penilaian dan evaluasi untuk Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Terget Renstra PD belum tercapai	Melaksanakan pengumpulan data melalui Data Base Satu Data
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	0 %	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum dilakukan penilaian untuk sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi yang ada pada pemerintah daerah	Terget Renstra PD belum tercapai	Membentuk tim keamanan informasi dan persandian yang solid, audit keamanan persandian secara berkala, pelatihan dan sertifikasi SDM yang berkualitas, evaluasi dan peningkatan kinerja berkelanjutan

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Hasil Analisa Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Dinas Kominfo						Realisasi Capaian Tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai Indeks SPBE	-	-	Cukup (1,8-<2,6)	Cukup (1,8-<2,6)	Baik (2,6-<3,5)	Baik (2,6-<3,5)	Sangat Baik (3,5-<4,2)	2,50	Cukup (2,22)	Baik (2,62)	Cukup (2,14)	Cukup (2,18)	Sangat Baik (3,62)	3,38
2	Persentase Aplikasi E-Government yang terhubung dengan jaringan	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	92%	92%	94,05 %	-	-	-
3	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	-	-	80%	85%	90%	-	-	-	100%	100%	71%	-	-	-
4	Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi	-	-	-	-	-	100 %	100%	-	-	-	-	98,85 %	100%	-
5	Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman	-	-	-	-	-	100 %	100%	-	-	-	-	98%	100%	-
6	Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan informasi publik	-	-	-	-	-	13%	25%	-	-	-	-	7%	90%	-
7	Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala	-	-	-	-	-	60%	80%	-	-	-	-	100%	100%	-
8	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	-	-	-	-	-	-	-	7%	-	-	-	-	-	7%

Berdasarkan tabel 2.2.1 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja mulai dari capaian akhir tahun 2019 hingga tahun 2024. Untuk indikator Nilai Indeks SPBE memperoleh capaian berpredikat **Sangat Baik** dari tahun sebelumya yang berpredikat rata-rata Baik. Sedangkan untuk indikator Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL) belum ada capaiannya, hal ini dikarenakan untuk tahun sebelumnya belum diterapkan indikator Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL). Namun di tahun 2024 indikator tersebut memiliki target 7%

dan terealisasi 7% sehingga memiliki capaian 100% atau berkriteria sangat tinggi mengingat indikator tersebut merupakan indikator awal dari target Renstra tahun 2024-2026.

Adapun indikator dari sasaran trategis dari tahun sebelumnya dengan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik pada poin 2,3,4,5,6,7 tidak menjadi indikator pada dokumen perencanaan periode 2024-2026.

Data capaian kinerja sebagaimana tabel 2.2.1 di atas diperoleh dari sumber:

1. Data Nilai indeks SPBE merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB terhadap semua instansi pusat dan Daerah;
2. Data Presentase aplikasi e-governmant yang terhubung dengan jaringan, Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman, dan data Presentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi diperoleh dari Laporan Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian;
3. Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik dan Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan informasi publik, Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala diperoleh dari Laporan Bidang Statistik Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik;
4. Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang diperoleh dari Laporan Kampung Digital Anjuk Ladang.

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Utama Dinas Komuikasi dan Informatika

No.	Indikator	Pehitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target		Realisasi	
			2022	2024	2025 TW I	2024	2025 TW I
1	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan KMPUNG DIAL}}{\text{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}}$ X 100%	N/A	7%	21%	7%	-

Dalam rangka mendorong percepatan capaian tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG (KAMPUNG DIAL) sebagai proyek Prioritas 2024-2026.

KAMPUNG DIAL adalah layanan terpadu dan berbasis elektronik di bidang pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pembentukan KAMPUNG DIAL bertujuan untuk:

1) Pelayanan Membahagiakan, yakni menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpadu, berbasis elektronik sehingga membahagiakan masyarakat.
2) Keluarga Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, yakni mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, cerdas, mandiri ekonomi, serta sigap melayani masyarakat rentan.
3) Masyarakat Harmonis, yakni menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terhindar dari konflik dan gangguan kambimas, serta keluarga yang tangguh dari bencana dan tangguh dari dampak buruk teknologi dan internet, mampu lmemanfaatkan teknologi dan internet untuk kesejahteraan keluarga.
4) Pemerintah Terpercaya, yakni membangun pemerintah desa dan kelurahan yang informatif (terbuka/transparan dalam kebijakan), responsif (tanggap terhadap keluhan/pengaduan masyarakat), serta profesional (berpengetahuan, tertib, dan produktif).
5) Masyarakat Partisipatif, yakni meciptakan desa/kelurahan yang berkarakter gotong royong serta masyarakat yang aktif berpartisipasi mendukung kelancaran pembangunan desa/kelurahan.

Berdasarkan tabel 2.2.2 di atas dapat disimpulkan pencapaian target untuk Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL) sebesar 7% dari target 7% di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2025 Tribulan I belum ada capaian atau realisasi disebabkan masih dalam tahapan perencanaan dan koordinasi dengan pihak yang terkait. Perhitungan untuk evaluasi KAMPUNG DIAL diperoleh dari jumlah Desa/Kelurhan yang menerapkan KAMPUNG DIAL dibagi dengan jumlah target Desa/Kelurahan.

Daftar Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/9/K/411.013/2024. Adapun jumlah Desa dan Kelurahan jyang ditargetkan sebanyak 20 untuk dijadikan percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1
Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN PERCONTOHAN
1	Bagor	Desa Sekarputih
2	Baron	Desa Kemaduh
3	Berbek	Desa Sendangbumen
4	Gondang	Desa Mojoseto

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN PERCONTOHAN
5	Jatikalen	Desa Munung
6	Kertosono	Desa Bangsri
7	Lengkong	Desa Lengkong
8	Loceret	Desa Tempelwetan
9	Nganjuk	Kelurahan Mangundikaran
10	Ngetos	Desa Kuncir
11	Ngluyu	Desa Sugihwaras
12	Ngronggot	Desa Kalianyar
13	Pace	Desa Mlandangan
14	Patianrowo	Desa Lestari
15	Prambon	Desa Nglawak
16	Rejoso	Desa Talang
17	Sawahan	Desa Sidorejo
18	Sukomoro	Desa Nglundo
19	Tanjunganom	Desa Malangsari
20	Wilangan	Desa Ngadipiro

Tabel 2.2.3
Pencapaian Kinerja Kunci Dinas Komuikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Pehitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target	Realiasi
			2022	2025	2025
1	Nilai aspek TIK	Hasil Penilaian Indeks SPBE	1,75	2,50	-
2	Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	Hasi Penilaian Indeks SPBE	1	3	-
3	Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	Hasil SAQ evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	*51,18	80	-

- Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi Kemenpan RB secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (maturity level) yaitu domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan domain Layanan SPBE. Dari 4 domain yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator dan penilaian dilakukan 1 kali dalam satu tahun.
- Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Skor KIP dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori yaitu tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif. Penilaian KIP dilakukan melalui Self Assesment Question atau SAQ oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk dengan skor atau nilai sampai dengan 100.

Berdasarkan tabel 2.2.3 di atas dapat disimpulkan pencapaian target Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika belum ada realisasi untuk penilaian Indek SPBE dikarenakan penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Kemenpan RB sedangkan untuk skor KIP belum ada penilaian atau monitoring evaluasi oleh Komisi Informasi Prov. Jatim, penilaian dilaksanakan setiap akhir tahun (Tribulan IV).

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan SDM yang berkualitas, potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan strategi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air khususnya penanganan banjir perkotaan, lingkungan hidup dan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2024-2026, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;

12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Tabel 3.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
1	Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik.	22.001.150.447,50

Tabel 3.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran Dinas Kominfo	Alokasi (2025)
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	22.001.150.447,50

1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 Tujuan yang ingin dicapai adalah :

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah: **Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal.**

Untuk tahun 2025 tujuan dan sasaran serta target yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indiktor Tujuan/Sasaran	Target 2025
1	2	3	
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik		Nilai Indeks SPBE	2,75
	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	21%

1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025 serta melaksanakan Visi dan Misi Bupati maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Kerja yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagian besar di Dinas Komunikasi dan informatika serta desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Adapun yang melatarbelakangi perubahan atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat** **Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai** **Nilai**	**82** **86**	**82** **86**	**82** **86**	**6.855.276.937**	**6.702.832.778**	**6.442.029.011**		
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Dokumen**	**69**	**69**	**69**	**75.390.000**	**58.754.000**	**58.754.000**		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	20.000.000	14.170.000	14.170.000		
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	30	30	30	15.000.000	10.499.000	10.499.000	-	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	30	30	30	9.990.000	7.100.000	7.100.000	-	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	6	30.400.000	26.985.000	26.985.000	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di susun**	**Dokumen**	**63**	**63**	**63**	**5.368.246.967**	**5.356.549.967**	**4.903.493.000**		
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	22	22	5.328.264.967	5.328.264.967	4.875.208.000	(453.056.967)	Anggaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN melebihi kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	45	45	45	20.000.000	11.369.000	11.369.000	-	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	9.997.000	9.997.000	9.997.000	-	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	13	13	9.985.000	6.919.000	6.919.000	-	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**Dokumen**	**25**	**25**	**25**	**9.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**		
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	20	9.000.000	7.000.000	7.000.000	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan**	**Laporan**	**12**	**12**	**12**	**431.458.470**	**312.347.311**	**343.287.311**		
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	9.999.500	9.999.500	9.999.500	-	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	48.577.430	48.577.430	63.007.430	14.430.000	Banyaknya arsip yang harus disimpan dan tertata sehingga membutuhkan perlengakapan kantor yang mendukung pengarsipan berkas
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	91.412.300	75.932.600	92.442.600	16.510.000	Banyak kegiatan didalam dan diluar kantor yang membutuhkan natura atau air minum
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	16.199.340	12.278.931	12.278.931	-	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	912	912	912	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	30	250.071.000	152.161.000	152.161.000	-	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	300	300	300	7.198.900	5.397.850	5.397.850	-	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**Buah**	**26**	**26**	**26**	**208.680.000**	**208.680.000**	**52.170.000**		
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	15	208.680.000	208.680.000	52.170.000	(156.510.000)	Belanja Modal berkurang untuk penambahan pemeliharaan kendaraan dinas dan rehab gedung kantor
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**Jasa**	**4**	**4**	**4**	**455.514.350**	**455.514.350**	**455.514.350**		
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	373.500.000	373.500.000	373.500.000	-	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	80.014.350	80.014.350	80.014.350	-	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**Unit**	**42**	**42**	**42**	**306.987.150**	**303.987.150**	**621.810.350**		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	10	183.587.550	183.587.550	384.586.300	200.998.750	Banyak kegiatan kantor didalam maupun diluar kota yang membutuhkan kendaraan operasional sehingga dibutuhkan pemeliharaan ekstra untuk merawat kendaraan dinas operasional
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	25	23.400.000	23.400.000	24.010.000	610.000	seringnya penggunaan peralatan kantor sehingga butuh perawatan yang memadai
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	99.999.600	96.999.600	213.214.050	116.214.450	perawatan rutin dalam rangka pencegahan kerusakan bangunan kantor serta perbaikan ruangan yang digunakan untuk keperluan arsip
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**	**Nilai**	**80**	**80**	**80**	**1.187.419.600**	**924.139.900**	**906.971.100**		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	- **Jumlah KIM berpredikat " Aktif "** - **Jumlah PD dengan Media Komunikasi yang aktif** - **Jumlah Perangkat Daerah berpredikat " Informatif "** - **Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu**	**KIM** **PD** **PD** **%**	**10** **5** **25** **100**	**10** **5** **25** **100**	**10** **5** **25** **100**	**1.187.419.600**	**924.139.900**	**906.971.100**		
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	10	10	10	89.149.900	60.960.500	60.960.500	-	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	30	30	30	109.600.000	78.199.000	78.199.000	-	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	7	7	7	988.669.700	784.980.400	767.811.600	(17.168.800)	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Nilai Aspek TIK**	**Nilai**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**13.713.758.286**	**13.049.543.286**	**13.847.704.837**		
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**3**	**3**	**3**	**71.205.000**	**65.992.000**	**65.992.000**		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	12	12	12	71.205.000	65.992.000	65.992.000	-	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat kematangan layanan pusat data Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK**	**Nilai**	**3**	**3**	**3**	**13.642.553.286**	**12.983.551.286**	**13.781.712.837**		
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1	1.390.576.919	1.383.901.919	1.373.901.919	(10.000.000)	pengurangan rincian belanja untuk penambahan natura
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	2	2	2	504.800.000	407.940.000	407.940.000	-	
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit	1	1	1	4.396.320.912	3.848.698.912	3.975.052.924	126.354.012	perawatan pendukung jaringan
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	52	52	52	7.350.855.455	7.343.010.455	8.024.817.993,50	681.807.539	Penambahan belanja untuk pembayaran internet

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab/Kota									
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka**	**Nilai**	**3**	**3**	**3**	**1.243.125.000**	**1.236.375.000**	**262.979.500**		
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah buku profil Daerah yang diterbitkan**	**Buku**	**1**	**1**	**1**	**1.243.125.000**	**1.236.375.000**	**262.979.500**		
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1	1	1	1.243.125.000	1.236.375.000	262.979.500	(973.395.500)	kegiatan resogsek dilaksanakan langsung oleh kemensos berupa updating Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajamen Keamanan Informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah Daerah**	**%**	**88**	**88**	**88**	**635.625.000**	**541.466.000**	**541.466.000**		
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanaan SPBE**	**Nilai**	**2**	**2**	**2**	**635.625.000**	**541.466.000**	**541.466.000**		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target			Pagu Indikatif			Bertambah/ Berkurang	Keterangan
				APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	APBD 2025	Pergeseran APBD/ Efisiensi 2025	Perubahan RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	12	12	12	635.625.000	541.466.000	541.466.000	-	
	Jumlah						**23.635.204.823**	**22.454.356.964**	**22.001.150.447,50**		

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
1) Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
2) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah.
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa;

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
1) Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi;
2) Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk membutuhkan Anggaran sebesar **Rp. 22.001.150.447,50** yang dipenuhi dari sumber Dana Alokasi Umum.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah:

1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo :
   a) Tujuan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
   b) Sasaran Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal;

1) Mendukung Pencapaian Target Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

   Kegiatan tahun 2025 mendukung pencapaian target SDGs yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan informatika. Target SDGs yang dimaksud adalah :
   a) Jumlah Perangkat daerah yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan target 50 Instansi.
   b) Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan target 100%.
   c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan target 52 PPID.

2) Mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 95 tahun 2018.
3) Melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4) Melaksanakan Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggarakan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
5) Melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah.

Rumusan Rencana program/kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana ***Tabel Berikut:***

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. NGANJUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**28.184.284.923,00**	**23.635.204.823,00**	**22.001.150.447,50**	**-6.183.134.475,50**							**30.807.700.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.184.284.923,00**	**23.635.204.823,00**	**22.001.150.447,50**	**-6.183.134.475,50**							**30.807.700.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**26.285.534.923,00**	**21.758.454.823,00**	**21.196.704.947,50**	**-5.088.829.975,50**							**28.807.700.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP Perangkat Daerah**				**86 82 Nilai Nilai**	**82 86 Nilai Nilai**	**4.243.028.937,00**	**6.855.278.937,00**	**6.442.029.011,00**	**1.211.873.063,00**							**5.454.700.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				69 Dokumen	69 Dokumen	75.390.000,00	75.390.000,00	58.754.000,00	-16.636.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Kominfo		34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	14.170.000,00	-5.830.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.499.000,00	-4.501.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	9.990.000,00	9.990.000,00	7.100.000,00	-2.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	30.400.000,00	30.400.000,00	26.985.000,00	-3.415.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di susun*				63 Dokumen	63 Dokumen	2.755.996.967,00	5.368.246.967,00	4.903.493.000,00	2.147.496.033,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Kominfo		3.879.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.716.014.967,00	5.328.264.967,00	4.875.208.000,00	2.159.193.033,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			3.855.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.369.000,00	-8.631.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.997.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	9.985.000,00	9.985.000,00	6.919.000,00	-3.066.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun*				25 Dokumen	25 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	-2.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian	Pegawai Dinas Kominfo		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan*				12 Laporan	12 Laporan	431.458.470,00	431.458.470,00	343.287.311,00	-88.171.159,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian	Pegawai Dinas Kominfo		429.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.999.500,00	9.999.500,00	9.999.500,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.577.430,00	48.577.430,00	63.007.430,00	14.430.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.412.300,00	91.412.300,00	92.442.600,00	1.030.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian			92.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.199.340,00	16.199.340,00	12.278.931,00	-3.920.409,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian			16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				912 Dokumen	912 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	250.071.000,00	250.071.000,00	152.161.000,00	-97.910.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	7.198.900,00	7.198.900,00	5.397.850,00	-1.801.050,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian			7.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan*				26 Buah	26 Buah	208.680.000,00	208.680.000,00	52.170.000,00	-156.510.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Kominfo		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	208.680.000,00	208.680.000,00	52.170.000,00	-156.510.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*				4 Jasa	4 Jasa	455.514.350,00	455.514.350,00	455.514.350,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Kominfo		587.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	373.500.000,00	373.500.000,00	373.500.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.014.350,00	80.014.350,00	80.014.350,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara*				42 Unit	42 Unit	306.987.150,00	306.987.150,00	621.810.350,00	314.823.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Perekonomian	Pegawai Dinas Kominfo		315.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	183.587.550,00	183.587.550,00	384.586.300,00	200.998.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	23.400.000,00	23.400.000,00	24.010.000,00	610.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			15.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	99.999.600,00	99.999.600,00	213.214.050,00	113.214.450,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**				**80 Nilai**	**80 Nilai**	**2.298.749.700,00**	**1.187.419.600,00**	**906.971.100,00**	**204.250.300,00**							**2.503.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KIM berpredikat " Aktif "* *Jumlah PD dengan Media Komunikasi yang aktif* *Jumlah Perangkat Daerah berpredikat " Informatif "* *Persentase pengaduan masyarakat yang tersepon tepat waktu*				100 % 10 KIM 25 PD 5 PD	100 % 10 KIM 25 PD 5 PD	2.298.749.700,00	1.187.419.600,00	906.971.100,00	-1.391.778.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian	Masyarakat		2.503.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				10 Komunitas	10 Komunitas	89.149.900,00	89.149.900,00	60.960.500,00	-28.189.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				30 Permohonan	30 Permohonan	109.600.000,00	109.600.000,00	78.199.000,00	-31.401.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			83.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/jukmis				7 Media	7 Media	2.099.999.800,00	988.569.700,00	767.811.600,00	-1.332.188.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			2.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Nilai Aspek TIK**				**2,50 Nilai**	**2,50 Nilai**	**19.743.758.286,00**	**13.713.758.286,00**	**13.847.704.836,50**	**2.106.241.714,00**							**21.850.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah*				3 Nilai	3 Nilai	71.205.000,00	71.205.000,00	65.992.000,00	-5.213.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	71.205.000,00	71.205.000,00	65.992.000,00	-5.213.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kematangan layanan pusat data Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK*				3 Nilai	3 Nilai	19.672.553.286,00	13.642.553.286,00	13.781.712.836,50	-5.890.840.449,50			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		21.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.780.576.919,00	1.390.576.919,00	1.373.901.919,00	-406.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	504.800.000,00	504.800.000,00	407.940.000,00	-96.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				1 unit	1 unit	5.836.320.912,00	4.396.320.912,00	3.975.052.924,00	-1.861.267.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			7.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	11.550.855.455,00	7.350.855.455,00	8.024.817.993,50	-3.526.037.461,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 4 Prov - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan; P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			12.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.243.125.000,00**	**1.243.125.000,00**	**262.979.500,00**	**-980.145.500,00**							**700.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka**				**3 Nilai**	**3 Nilai**	**1.243.125.000,00**	**1.243.125.000,00**	**262.979.500,00**	**-543.125.000,00**							**700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah buku profil Daerah yang diterbitkan*				1 Buku	1 Buku	1.243.125.000,00	1.243.125.000,00	262.979.500,00	-980.145.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi. P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	1.243.125.000,00	1.243.125.000,00	262.979.500,00	-980.145.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi. P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Pereknomian			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**635.825.000,00**	**635.625.000,00**	**541.466.000,00**	**-94.159.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah Daerah**				**88 %**	**88 %**	**635.825.000,00**	**635.625.000,00**	**541.466.000,00**	**-335.825.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanaan SPBE*				2 Nilai	2 Nilai	635.825.000,00	635.625.000,00	541.466.000,00	-94.159.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi. P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	635.625.000,00	635.625.000,00	541.466.000,00	-94.159.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi. P5 Kab : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah DanAktivitas Pereknomian			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	JUMLAH								**28.164.284.823,00**	**23.635.204.823,00**	**22.001.150.447,50**	**-6.163.134.475,50**							**30.907.700.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001